

## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022

**Farida Rahmawati<sup>1</sup>, Ayogia Ayonono Susanto<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Malang

### INFORMASI ARTIKEL

#### *Histori Artikel:*

Diterima Juni, 2023  
Direvisi Agustus, 2023  
Diterbitkan September, 2023

#### *Keyword:*

*Effectiveness  
Efficiency  
Regional budget*

### ABSTRACT

*The regional expenditure budget is used as a reference for measuring effectiveness and efficiency in assessing regional government performance. This study aims to be able to analyze the level of effectiveness and efficiency in the regional budget at BPKAD Bojonegoro Regency in 2018-2022. The data used in this study uses data from the Budget Realization Report for 2018-2022 obtained at the BPKAD of Bojonegoro Regency. The method that will be used for this research is to use a quantitative descriptive method. The results of research at BPKAD Bojonegoro Regency in 2018-2022 show the level of effectiveness in 2018-2019 is in the ineffective category. In 2020 it has increased to be quite effective. In 2021 it will decrease to a less effective category. In 2022 it will increase to the effective category. Meanwhile, the level of efficiency in 2018-2020 is categorized as efficient. In 2021-2022 it has a very efficient category.*

#### *Corresponding Author:*

Ayogia Ayonono Susanto,  
Universitas Negeri Malang,  
Jl. Semarang 5, Malang, 65145, Indonesia,  
Email: ayogiabjn@gmail.com

## Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah penganut dari asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Desentralisasi dapat di artikan sebagai penyerahan otoritas pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar bisa mengatur atau mengurus daerahnya secara mandiri tanpa adanya tangan campur dari pemerintah secara langsung. Dengan adanya penyerahan otoritas tersebut akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, karena pemerintah daerah lebih paham mengenai kebutuhan dan pembangunan daerahnya ketimbang pemerintah pusat. Dengan begitu akan membuat pembangunan menjadi merata dan pemerintah daerah bisa bersaing secara regional hingga secara internasional. Hal ini juga mengacu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu mengenai Pemerintahan Daerah atau juga yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa melaksanakan kegiatannya secara bebas dan optimal (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Dalam mengembangkan daerah salah satu caranya adalah dengan menyusun anggaran dengan baik sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perekonomian daerah. Anggaran adalah susunan yang tertulis yang berhubungan dengan kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran vital sebagai rencana keuangan yang disusun secara teratur dan dengan baik untuk bisa mendukung tercapainya atau tujuan dari program dalam suatu organisasi (Widowati & Fatimah, 2022). Dalam pemerintahan isi dari anggaran pemerintah mencakup dari semua kegiatan yang direncanakan yang disediakan sebagai rencana perolehan pendapatan serta rencana pengeluaran dalam satuan moneter (Pangkey & Pinatik, 2015).

Penggunaan dan pemanfaatan anggaran tidak akan lepas dari pemerintah daerah. Setiap tahunnya pemerintah daerah akan menyusun perencanaan anggaran atau juga yang biasa disebut dengan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rampengan, et al, 2016). Dalam Pemerintah daerah APBD memiliki tujuan untuk mengatur dalam hal pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode satu tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sujarweni (2015), perencanaan dan

penyusunan ialah sebuah urutan seperti siklus dimana siklus tersebut saling berhubungan serta akan selalu berjalan dengan kurun waktu tertentu. Dalam APBD terdapat beberapa struktur, salah satu strukturnya adalah Belanja Daerah. Belanja daerah ialah suatu keharusan dari pemerintah daerah yang dilegalkan dalam pengurangan perihal nilai kekayaan yang bersih dengan masa tahun anggaran yang bersangkutan (Kainde, 2013).

Analisis efektivitas dan efisiensi sangat berguna dalam menilai kinerja keuangan dalam penggunaannya apakah telah digunakan dengan baik atau tidak. Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas bisa menjadi alat pengukur berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Dikatakan berhasil jika efektif. Dalam efektivitas tidak hanya berpacu terhadap besarnya biaya yang akan di keluarkan untuk mencapai tujuan yang dalam suatu program melainkan efektivitas hanya akan dilihat dalam suatu program apakah kegiatan yang telah dianggarkan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walau biaya yang dikeluarkan akan melebihi apa yang telah dianggarkan (Larasati & Handayani, 2021). Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara *input* dengan *output* dimana *input* merupakan masukan sedangkan *output* adalah hasil antara keuntungan dengan sumber sumber daya yang digunakan (Yakub, Wijaya, & Effendi). Menurut Sedarmayanti (2014) efisiensi ialah ukuran dari suatu tingkat dalam hal penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Dimana jika penggunaan sumberdaya yang digunakan semakin hemat maka proses akan dikatakan efisien.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang biasa juga disebut BPKAD ialah instansi pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi atau tugas dalam hal menunjang urusan dari Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan dan juga aset daerah. Keuangan daerah Menurut Kuswandi (2016) ialah segala hak serta kewajiban daerah yang bisa diukur dengan uang atau segala sesuatu yang berupa uang serta barang yang bisa dijadikan milik daerah yang memiliki hubungan alam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Aset Daerah adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diperoleh melalui pembelian beban APBD.

Karena perihal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk memahami atau mengetahui seberapa tingkat efektivitas pada pelaksanaan anggaran belanja daerah dan efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022.

## Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, metode yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono (2015) ialah teknik analisis data dengan cara menguraikan dari suatu data yang telah dikumpulkan dengan tanpanya akan maksud untuk membuat kesimpulan yang akan berlaku bagi umum. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro dengan tahun anggaran 2018-2023.

Perhitungan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kriteria efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 pada tahun 1996 untuk mengetahui karakteristik seberapa tingkat efektivitas dalam anggaran belanja daerah bisa dinyatakan seperti berikut :

- (1) Dikatakan sangat efektif bila persentase lebih dari 100%
- (2) Dikatakan kurang efisien bila persentase 90% hingga 100%
- (3) Dikatakan cukup efisien bila persentase 80% hingga 90%
- (4) Dikatakan efisien bila persentase 60% hingga 80%
- (5) Dikatakan sangat efisien bila persentase kurang dari 60%

Sedangkan Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kriteria efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 pada tahun 1996 untuk mengetahui karakteristik seberapa tingkat efisien anggaran belanja daerah dapat dinyatakan seperti berikut :

- (1) Dikatakan tidak efisien bila persentase lebih dari 100%
- (2) Dikatakan kurang efisien bila persentase 90% hingga 100%
- (3) Dikatakan cukup efisien bila persentase 80% hingga 90%
- (4) Dikatakan efisien bila persentase 60% hingga 80%
- (5) Dikatakan sangat efisien bila persentase kurang dari 60%

## Hasil Dan Pembahasan

### Hasil

Untuk melihat hasil analisis kriteria tingkat efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja daerah di BPKAD Bojonegoro dapat diketahui dengan melihat pembagian dari realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.** Target Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2022

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase (%)	Kriteria
2018	26.735.803.054,00	12.070.999.388,00	45,15%	Tidak Efektif
2019	26.712.842.786,00	12.707.264.513,00	47,57%	Tidak Efektif
2020	15.057.928.498,10	12.394.756.939,00	82,31%	Cukup Efektif
2021	1.286.145.828.549,41	921.192.044.430,79	71,62%	Kurang efektif
2022	1.502.847.761.914,00	1.396.782.103.592,41	92,94%	Efektif

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023

Sedangkan untuk melihat hasil dari analisis tingkat kriteria efisiensi dalam penggunaan atau pengelolaan anggaran belanja daerah di BPKAD Bojonegoro dapat diketahui dengan melihat pembagian antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.** Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Belanja Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase (%)	Kriteria
2018	8.510.201.904,00	12.070.999.388,00	70,50%	Efisien
2019	9.094.645.553,00	12.707.264.513,00	71,57%	Efisien
2020	8.629.006.175,00	12.394.756.939,00	69,61%	Efisien
2021	9.266.795.479,00	921.192.044.430,79	1%	Sangat Efisien
2022	8.106.151.270,80	1.396.782.103.592,41	0,58%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023

### Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara” pada tahun 2010 – 2014 (Pangkey dan Pinatik, 2018). Tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2010-2014 berfluktuasi dari tahun ke tahun hal tersebut bisa terjadi karena pada realisasi anggaran yang ingin dicapai tidak sesuai atau tidak tercapai dengan target yang sudah ditetapkan dan pada pengeluaran anggaran belanja yang tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Sedangkan pada tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2010-2014 dikategorikan tidak efisien, hal tersebut terjadi karena anggaran yang digunakan melampaui anggaran yang ditetapkan.

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja” pada tahun 2011-2015 (Sari et al., 2018) . Berdasarkan hasil penelitian tersebut kriteria untuk tingkat efektivitas pada tahun 2011 – 2015 yaitu bervariasi dimana pada tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 cukup efektif. Sedangkan tahun 2011-2013 dan 2015 dikatakan kurang efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran seperti anggaran belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Sedangkan pada tingkat efisiensi pada tahun 2011-2015 memiliki tingkat efisiensi yang baik hal tersebut bisa terjadi karena pengelolaan anggaran belanja dengan menggunakan dana yang minimal untuk bisa mencapai hasil yang maksimal.

Sedangkan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara” pada tahun 2013-2015 (Lantu, et al.,2017). Berdasarkan hasil

penelitian tersebut pada tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2013-2015 pada tahun 2013 merupakan kategori yang paling rendah yaitu cukup efektif dibandingkan dengan tahun 2014-2015 yang berkategori efektif. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat beberapa program yang direalisasikan tetapi tidak dilakukan secara optimal, salah satunya adalah belanja alat tulis kantor yang ternyata tidak direalisasikan karena hal itu sudah masuk dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Sedangkan pada tingkat efisiensi pada tahun 2013-2015 dengan tingkat efisiensi yang berkategori sangat efisien yang bisa berarti Dinas kehutanan bisa dikatakan sangat berhasil untuk mengelola pada anggaran belanja dengan hemat yang menghasilkan hasil yang optimal

(a) Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro :

Efektivitas Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai tahun 2022 memiliki kriteria tingkat efektivitas yang cukup berfluktuasi dimana Tingkat efektivitas pada BPKAD Bojonegoro pada tahun 2018 - 2022 dalam merealisasikan anggaran yang diberikan yaitu kurang baik. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya anggaran yang di berikan tidak sebanding dengan realisasinya.

Selama periode tersebut pada tahun 2018 merupakan tingkat efektivitas terendah yaitu 45,15% dengan kriteria tidak efektif, hal tersebut bisa terjadi karena realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan salah satunya adalah belanja pegawai. Dimana pada belanja pegawai hanya terealisasi sebesar 37,32% dimana anggaran yang diberikan sebesar Rp21.198.495.566,00 dengan realisasi anggaran hanya mencapai Rp7.911.950.484,00 bisa dikatakan realisasi dengan anggaran yang sudah dianggarkan tergolong kecil.

Hal serupa juga terjadi pada tahun 2019 dimana tingkat efektivitas juga termasuk dalam kriteria tidak efektif, tetapi terdapat sedikit peningkatan dari pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 47,57% hal tersebut bisa terjadi karena sedikit meningkatnya realisasi anggaran salah satunya adalah belanja pegawai, dimana anggaran yang diberikan sebesar Rp19.821.476.606,00 dengan realisasi hanya sebesar Rp7.974.332.960 walaupun sudah meningkat dibandingkan tahun 2018 tetapi realisasi terhadap anggaran yang diberikan masih tergolong kecil.

Di tahun 2020 kriteria tingkat efektivitas mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas menjadi kriteria yang cukup efektif dengan persentase 82,31%. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggarannya salah satunya adalah realisasi terhadap belanja barang dengan realisasi sebesar 68,94% dengan anggaran belanja barang yang sebesar Rp4.519.251.231,00 dengan realisasinya sebesar Rp3.115.761.925,00. Namun hal tersebut masih terbilang cukup rendah dikarenakan masih jauh dengan anggaran yang sudah diberikan namun realisasi pada anggaran yang lain sudah cukup baik.

Pada tahun 2021 kriteria tingkat efektivitas mengalami penurunan kembali dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2021 kriteria tingkat efektivitasnya menjadi kriteria kurang efektif dengan persentase 71,62%. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan, salah satunya adalah realisasi terhadap belanja barang tak terduga dimana realisasinya hanya sebesar 19,43% dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp178.166.140.168,40 dengan realisasi hanya sebesar Rp34.619.677.607,00. Dimana realisasi tersebut sangat kecil dengan anggaran belanja yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 tingkat efektivitas mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu menjadi kriteria efektif dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dengan persentase 92,94%. Walaupun sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan salah satunya adalah belanja tidak terduga dimana realisasinya hanya sebesar 47,96% dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp71.041.491.483,00 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp34.072.835.218,00. Walau begitu pada tahun 2021 realisasi terhadap anggaran yang diberikan sudah cukup digunakan dengan baik sehingga pada tahun tersebut bisa berada pada kriteria tingkat efektif

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun yaitu pada tahun 2018 – 2022 dimana pada tahun tersebut dalam merealisasikan anggaran yang diberikan bisa di bilang kurang baik terkecuali pada tahun 2022. Hal ini bisa terjadi karena terdapat beberapa anggaran yang sudah diberikan atau ditetapkan tetapi tidak direalisasikan atau dijalankan dengan baik, tahun 2018 merupakan tingkat kriteria terendah dengan persentase 45,15% dan tahun 2022 merupakan kriteria tertinggi dengan persentase 92,94%.

(b) Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro :

Kriteria tingkat efisiensi dalam Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik. Hal ini bisa berarti pada tahun 2018-2023 BPKAD Kabupaten Bojonegoro menggunakan dana dengan hemat dalam penggunaan anggaran belanja.

Pada tahun 2018 tingkat efisiensi berada pada tingkat efisien dengan persentase 70,50%. Hal ini bisa dilihat melalui realisasi anggaran belanja langsung pada belanja pegawai memiliki persentase sebesar 83,14% dengan besarnya anggaran belanja langsungnya sebesar Rp5.233.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.351.153.000,00. Belanja barang dan jasa memiliki persentase 72,07% dengan anggaran belanja langsungnya sebesar Rp4.865.607.488,00 dengan realisasi sebesar Rp3.506.604.904,000. Serta belanja modal memiliki persentase 97,13% dengan anggaran belanja langsungnya sebesar Rp671.700.000 dengan realisasi Rp652.444.000. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Bojonegoro sudah dinilai baik dalam menghemat penggunaan anggaran.

Pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisiensi berada pada tingkat efisien dengan persentase 71,57% . Hal ini bisa terjadi karena realisasi anggaran belanja langsung pada belanja pegawai persentase yang dimiliki adalah sebesar 81,31% dengan besar anggaran belanja langsung sebesar Rp5.364.069.000,00 dengan realisasi Rp.4361.714.000,00. Belanja barang dan jasa memiliki persentase 65,40% dengan anggaran belanja langsung Rp5.932.048.680,00 dengan realisasi Rp3.879.307.403,00. Pada belanja modal memiliki persentase 88,98% dengan anggaran belanja langsung Rp959.317.500,00 dengan realisasi Rp853.624.150,00. Walaupun persentase pada tingkat efisiensi meningkat tetapi tetap menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Bojonegoro masih baik dalam menghemat penggunaan anggaran.

Pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efisiensi pada kriteria efisien dengan persentase 69,61% dimana hal tersebut merupakan penurunan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya . Hal ini bisa terjadi karena realisasi anggaran belanja langsung pada belanja pegawai persentase yang dimiliki adalah sebesar 84,39% dengan besar anggaran belanja langsungnya sebesar Rp5.366.585.000,00 dengan realisasi Rp4.529.098.000,00. Belanja barang dan jasa memiliki persentase 68,94% dengan anggaran belanja langsungnya sebesar Rp4.519.251.231,00 dengan realisasi Rp3.115.761.925,00. Pada belanja modal memiliki persentase 92,51% dengan anggaran belanja langsungnya sebesar Rp1.063.838.163,10 dengan realisasi Rp984.146.250,00. Walaupun mengalami penurunan dalam persentase dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019 tetapi BPKAD Kabupaten Bojonegoro masih baik dalam menghemat penggunaan anggaran.

Pada tahun 2021 menunjukan tingkat efisiensi pada kriteria sangat efisien dengan persentase 1% hal tersebut merupakan penurunan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena realisasi anggaran belanja langsung pada belanja barang dan jasa persentase yang dimiliki adalah sebesar 71,22% dengan besar anggaran belanja langsungnya sebesar Rp11.272.383.994,01 dengan realisasi Rp8.029.309.654,00. Pada belanja modal memiliki persentase 89,18% dengan besar anggaran belanja langsungnya sebesar Rp1.387.644.915,00 dengan realisasi Rp1.237.485.825,00. Walaupun mengalami penurunan yang signifikan terhadap persentase tahun sebelumnya yaitu 2020 tetapi semakin kecil persentase maka kriteria akan semakin efisien. Hal ini BPKAD Kabupaten Bojonegoro dinilai sudah sangat baik dalam menghemat penggunaan anggaran.

Pada tahun 2022 menunjukkan tingkat efisiensi pada kriteria Sangat efisien dengan persentase 0,58% hal tersebut merupakan penurunan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena realisasi anggaran belanja langsung pada belanja barang dan jasa persentase yang dimiliki sebesar 81,55% dengan besar anggaran belanja langsungnya sebesar Rp9.427.188.256,00 dengan realisasi Rp7.687.883.530,80. Pada modal belanja memiliki persentase 85,31% dengan besar anggaran belanja langsungnya sebesar Rp490.290.960,00 dengan realisasi Rp418.267.740,00. Dengan semakin kecilnya persentase maka kriteria akan semakin efisien. Sehingga BPKAD Kabupaten Bojonegoro dinilai sangat baik dalam menghemat pengeluaran anggaran.

Berdasarkan uraian diatas tingkat efisiensi pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun dengan tahun 2018 - 2022 memiliki kriteria efisien dan sangat efisien, yang bisa dibidang selama lima tahun tersebut BPKAD Kabupaten Bojonegoro sudah sangat baik. Hal ini bisa terjadi karena BPKAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 hingga 2022 dalam penggunaan anggaran yang sudah diberikan dilakukan secara hemat namun program yang dilaksanakan sudah dilakukan dengan baik. Pada tahun 2018 hingga 2020 tingkat efisiensi berada pada kriteria efisien. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 memiliki kriteria sangat efisien.

## Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian mengenai seberapa tingkat efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah BPKAD Bojonegoro, dengan tahun 2018-2022 dan seberapa tingkat efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Bojonegoro dengan tahun 2018-2022, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018-2022 beragam. Tingkat efektivitas paling tinggi terjadi pada waktu 2018 sampai 2022 terjadi pada tahun 2022 dan tingkat efektivitas yang paling terendah terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 dan 2019 tingkat efektivitasnya dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan tingkat efektivitas menjadi kriteria cukup efektif. Namun pada tahun 2021 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi kriteria kurang efektif dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi kriteria ke efektif. Terjadinya tidak efektifnya karena terdapat anggaran belanja yang realisasinya tidak memenuhi target.

Sedangkan pada tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah yang ada di BPKAD Bojonegoro dengan tahun 2018 - 2022 sudah dikelola dengan baik. Pada tahun 2018,2019, dan 2020 tingkat efisiensi dengan kriteria efisien. Pada tahun 2021 dan 2022 merupakan tingkat efisiensi yang paling tinggi yaitu kriteria sangat efisien. Pengelolaan anggaran belanja daerah bisa dikatakan sudah berhasil dalam penggunaan dana dalam menghemat penggunaan anggaran belanja.

## REFERENSI

- Kainde, Christian. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Belitung. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 393-400.
- Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi : Badan Penerbit Universitas Islam '45'(UNISMA)
- Lantu, C., Lambey, L., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1260-1270
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di KB Negeri Pelangi. *JIRA : Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-16.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta : Erlangga.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 33-43.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1-10.
- Rampengan, M., Nangoi, G. B., dan Manossoh, H. (2016). "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616-623.
- Sari, N. D., Mintarti, S., & Patisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(1), 38-43
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang. *Economics & Education Journal (Ecoducation)*, 4(1), 71-82.

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S, (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 15-28.